



P U T U S A N SIDANG ISTIMEWA MPR RI TAHUN 2001



**INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON**

5.2.3.82.07

**TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG**



CV. MINI JAYA ABADI

SP.MJA. 89.101.08.2001

**PUTUSAN
SIDANG ISTIMEWA MPR RI
TAHUN 2001**

**PENERBIT :
CV. MINI JAYA ABADI
JAKARTA 13410**

**PIMPINAN :
SUKARNO. DM.**

**PIMPINAN EDITING :
D. SOEMARMO**

**SETING :
NY. ARYANTI**

**LAYOUT MONTAGE :
SUWITO**

**DESIGN COVER :
NY. ARIFINI**

**PERCETAKAN :
PT. SEKALA JALMA KARYA**

CETAKAN PERTAMA 2001

IV

KATA PENGANTAR

Presiden Keempat Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Ketetapan MPR No. VII/MPR/1999 Hasil Pemilu 1999, sebagai Pengemban Mandataris MPR dinilai telah melakukan Pelanggaran.

Untuk menjaga Stabilitas Politik dan Kesenambungan Pembangunan, mandat tersebut telah dicabut melalui Sidang Istimewa MPR.

Sidang Istimewa MPR menghasilkan Empat Ketetapan dan Empat Keputusan.

Untuk mensosialisasikan Keputusan MPR tersebut, Penerbit mencetak dan menyebarkan keseluruh Indonesia.

Harapan Penerbit semoga buku ini bermanfaat.

**Jakarta, Agustus 2001
Penerbit**

V

No.	DAFTAR ISI	Halaman
	KATA PENGANTAR	
1.	Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2001 Tentang Sikap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Maklumat Presiden Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2001	3
2.	Ketetapan MPR RI Nomor 11/MPR/2001 Tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid	11
3.	Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2001 Tentang Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia	19
4.	Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001 Tentang Pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia ...	27

No.	DAFTAR ISI	Halaman
5.	Keputusan MPR RI Nomor I/MPR/2001 Tentang Waktu Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	35
6.	Keputusan MPR RI Nomor 2/MPR/2001 Tentang Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	43
7.	Keputusan MPR RI Nomor 3/MPR/2001 Tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	57
8.	Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2001 Tentang Pembentukan Panitia AD HOC Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	71

No.	DAFTAR ISI	Halaman
1.	Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	83
-	Bab IX A Wilayah Negara	85
-	Bab X Warga Negara dan Penduduk	86
-	Bab XA Hak Asasi Manusia	86
-	Bab XII Pertahanan Dan Keamanan Negara	89
-	Bab XV Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Lagu Kebangsaan	89
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2000 Tentang Perubahan Pertama Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	93
3.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 Tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	99
4.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	119

No.	DAFTAR ISI	Halaman
5.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	129
	I. Latar Belakang	133
	II Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	134
	III. Rekomendasi	135
	IV P e n u t u p.....	136
6.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 Tentang Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional.....	139
	Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional	
	- Bab I Pendahuluan	144
	- Bab II Identifikasi Masalah	146
	- Bab III Kondisi yang Diperlukan	148
	- Bab IV Arah Kebijakan	150
	- Bab V Kaidah Pelaksanaan	152
	- Bab P e n u t u p.....	153
	- Bab Lampiran Matriks Pemantapan Persatuan Dan Kesatuan Nasional (Persandingan BAB II, III, IV)	154
7.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	159

No.	DAFTAR ISI	Halaman
8.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	165
	- Bab I Tentara Nasional Indonesia	169
	- Bab II Kepolisian Republik Indonesia	171
	- Bab III P e n u t u p.....	173
9.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000	177
	Hasil Pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Dalam Melaksanakan GBHN dan Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000	183
	- Laporan Dewan Pertimbangan Agung	190
	- Laporan Dewan Perwakilan Rakyat	191
	- Laporan Badan Pemeriksa Keuangan.....	193
	- Laporan Mahkamah Agung	194
10.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2000 Tentang	

DAFTAR ISI

Halaman

No.

Penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Mempersiapkan Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 199

Materi Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Hasil Badan Pekerja MPR RI Tahun 1999 - 2000

- Bab I	Bentuk (Dasar), dan Kedaulatan	204
- Bab II	Majelis Permusyawaratan Rakyat ..	204
- Bab III	Kekuasaan Pemerintahan Negara ..	207
- Bab IV	Dewan Pertimbangan Agung	211
- Bab V	Kementerian Negara	212
- Bab VII A	Dewan Perwakilan Daerah	212
- Bab VII B	Pemilihan Umum	213
- Bab VIII	Hal Keuangan	214
- Bab VIII A	Badan Pemeriksa Keuangan.....	215
- Bab IX	Kekuasaan Kehakiman dan Pene- gakan Hukum	216
- Bab XI	Alternatif I : Agama (tetap)	
	Alternatif 2 : Ketuhanan Yang Maha Esa	218
- Bab XIII	Pendidikan dan Kebudayaan	220
- Bab XIV	Perekonomian Nasional dan Kesejah- teraan Sosial	221
- Bab XVI	Perubahan Undang-Undang Dasar .	222